



PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025

Direksi PT DUTA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, yang diselenggarakan di Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	Dewan Komisaris: Franciscus Xaverius R.D. selaku Wakil Komisaris Utama Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen Direksi: Teky Mailoa selaku Direktur Utama Lie Jani Harjanto selaku Wakil Direktur Utama Hongky Jeffry Nantung selaku Direktur Handoko Wibowo selaku Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	1.839.101.199 saham (99,41%) dari total 1.850.000.000 saham.
Agenda 1 dari Rapat	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00140/2.1090/AU.1/03/1905-2/1/III/2026 tanggal 05 Maret 2026, dengan pendapat "Wajar tanpa Pengecualian"; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada: (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan





	serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.101.199 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah dengan mufakat		
Agenda 2 dari Rapat	1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp.422.053.623.230,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sisanya sebesar Rp.420.053.623.230,- (empat ratus dua puluh miliar lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 2. Menetapkan penggunaan saldo laba ditahan/ dibagikan sebagai deviden tambahan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp.467.946.376.770,- (empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh). 3. Pembayaran deviden dari laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan deviden tambahan dari saldo laba ditahan seluruhnya sebesar Rp.888.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) akan dibagikan kepada para pemegang saham. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian		



	dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.101.199 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 3 dari Rapat	- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; - menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2025; dan - memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.101.199 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 4 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria sebagai berikut : - Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); - Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.101.199 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 5 dari Rapat	Dewan Komisaris Perseroan melaporkan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan		

	tanggal 08 September 2025, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku yang berakhir 31 Desember 2029, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Teddy Pawitra; Anggota : Rudiantara; Anggota : Rizal E. Halim.
--	--

**JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT DUTA PERTIWI Tbk
Tahun Buku 2025**

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording Date) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 25 Juni 2026 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 26 Juni 2026 : Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 29 Juni 2026 : Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 30 Juni 2026 : Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 16 Juli 2026 : Pembayaran Dividen Tunai.

2. Tatacara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Juni 2026 dan besarnya dividen yang akan diterima per lembar saham akan diinformasikan setelah tanggal *Recording Date*.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juli 2026. Bukti pembayaran Dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 16:00 WIB.

- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam huruf (d) di atas, Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai tahun buku 2025 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 Juni 2026
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD Perseroan:

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.



PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN BUKU 2025

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, yang diselenggarakan di Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	Dewan Komisaris: Franciscus Xaverius R.D selaku Wakil Komisaris Utama Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen Direksi: Teky Mailoa selaku Direktur Utama Lie Jani Harjanto selaku Wakil Direktur Utama Hongky Jeffry Nantung selaku Direktur Handoko Wibowo selaku Direktur								
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	1.839.085.199 saham (99,41%) dari total 1.850.000.000 saham.								
Agenda 1 dari Rapat	A. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan pemisahan klasifikasi bidang usaha utama dan penunjang serta penyesuaian untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:								
	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:								
	<table> <tr> <td>1629</td><td>INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU, INDUSTRI BARANG DARI GABUS, JERAMI, ROTAN, BAMBU dan SEJENISNYA;</td></tr> <tr> <td>3600</td><td>PENAMPUNGAN, PENGAMBILAN, PENGOLAHAN, DAN PENYEDIAAN AIR;</td></tr> <tr> <td>4101</td><td>KONSTRUKSI KONVENSIONAL BANGUNAN GEDUNG;</td></tr> <tr> <td>4210</td><td>KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN</td></tr> </table>	1629	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU, INDUSTRI BARANG DARI GABUS, JERAMI, ROTAN, BAMBU dan SEJENISNYA;	3600	PENAMPUNGAN, PENGAMBILAN, PENGOLAHAN, DAN PENYEDIAAN AIR;	4101	KONSTRUKSI KONVENSIONAL BANGUNAN GEDUNG;	4210	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN
1629	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU, INDUSTRI BARANG DARI GABUS, JERAMI, ROTAN, BAMBU dan SEJENISNYA;								
3600	PENAMPUNGAN, PENGAMBILAN, PENGOLAHAN, DAN PENYEDIAAN AIR;								
4101	KONSTRUKSI KONVENSIONAL BANGUNAN GEDUNG;								
4210	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN								





	REL; 4220 KONSTRUKSI PROYEK UTILITAS; 4299 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL; 4312 PENYIAPAN LAHAN; 4321 PEMASANGAN SISTEM KELISTRIKAN; 4322 PEMASANGAN SALURAN AIR (PLUMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN UDARA; 4329 PEMASANGAN KONSTRUKSI LAINNYA; 4330 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN; 4610 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK; 5221 AKTIVITAS JASA TERKAIT TRANSPORTASI DARAT; 5610 AKTIVITAS RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING; 6811 AKTIVITAS REAL ESTAT (BANGUNAN DAN LAHAN) HUNIAN MILIK SENDIRI ATAU SEWA; 6812 AKTIVITAS REAL ESTAT (BANGUNAN DAN LAHAN) NONHUNIAN MILIK SENDIRI ATAU SEWA; 6829 AKTIVITAS REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK LAINNYA; 7020 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS; 8130 AKTIVITAS JASA LANSKAP; 9311 PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA; 9321 AKTIVITAS TAMAN BERTEMA DAN TAMAN HIBURAN
	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Kegiatan usaha utama: 68111 AKTIVITAS PENGEMBANGAN BANGUNAN DAN LAHAN HUNIAN; 68112 AKTIVITAS PENYEWAAN BANGUNAN DAN LAHAN HUNIAN MILIK SENDIRI ATAU SEWA; 68125 PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN; 68126 PENYEWAAN GUDANG DAN FASILITAS PENYIMPANAN MANDIRI;



24



	68127	PENGELOLAAN GEDUNG PERKANTORAN;
	68129	AKTIVITAS REAL ESTAT (BANGUNAN DAN LAHAN) NONHUNIAN LAINNYA MILIK SENDIRI ATAU SEWA;
	68292	PENGELOLAAN REAL ESTAT HUNIAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
	68299	AKTIVITAS REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK LAINNYA YTDL;
	b. Kegiatan usaha penunjang :	
	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU;
	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN SELAIN ROTAN DAN BAMBU;
	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN FURNITUR ;
	36001	PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN AIR MINUM;
	36003	AKTIVITAS PENUNJANG PENYEDIAAN AIR;
	41011	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HUNIAN;
	41012	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERKANTORAN;
	41014	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERBELANJAAN;
	41017	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENGINAPAN;
	41018	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HIBURAN DAN OLAHRAGA;
	41019	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG LAINNYA;
	42101	KONSTRUKSI JALAN PADA PERMUKAAN TANAH;
	42102	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS;
	42201	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE;
	42202	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH;
	42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH;
	42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL;
	42205	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA





	TRANSPORTASI;	
42206	KONSTRUKSI	SENTRAL
	TELEKOMUNIKASI;	
42207	KONSTRUKSI	PENGEBORAN/
	PENGGALIAN AIR TANAH;	
42209	KONSTRUKSI	PROYEK UTILITAS
	LAINNYA;	
42999	KONSTRUKSI	BANGUNAN SIPIL
	LAINNYA YTDL;	
43120	PENYIAPAN LAHAN;	
43211	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK;	
43212	PEMASANGAN	JARINGAN
	TELEKOMUNIKASI;	
43221	PEMASANGAN	SALURAN AIR
	(PLUMBING);	
43223	PEMASANGAN	JARINGAN
	PENYALURAN GAS;	
43299	PEMASANGAN KONSTRUKSI LAINNYA	
	YTDL;	
43301	PEMASANGAN KACA, PINTU, KUSEN,	
	JENDELA, DAN SEJENISNYA;	
43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, DAN	
	PLAFON;	
43303	PENGECETAN	
43309	PENYELESAIAN	KONSTRUKSI
	BANGUNAN LAINNYA;	
46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR	
	BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK;	
52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR	
	BADAN JALAN (OFF STREET PARKING);	
56101	AKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DI	
	BANGUNAN TETAP;	
68122	PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI;	
70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN	
	DAN BISNIS LAINNYA;	
81300	AKTIVITAS JASA LANSKAP;	
93113	FASILITAS GELANGGANG/ ARENA;	
93114	FASILITAS LAPANGAN;	
93119	PENGELOLAAN FASILITAS OLAAHRAGA	
	LAINNYA;	
93210	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA DAN	
	TAMAN HIBURAN.	
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan dan menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal		





	23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada / nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.085.199 suara (100%)	nihil	nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 2 dari Rapat	1. a. menerima baik pengunduran diri Bapak Muktar Widjaja dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan; b. memberhentikan dengan hormat Bapak Franciscus Xaverius Ridwan Darmali dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>"acquit et decharge"</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; c. menyetujui pengangkatan : - Bapak Franciscus Xaverius Ridwan Darmali selaku Komisaris Utama Perseroan; - Ibu Monik William selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Irhoan Tanudiredja selaku Komisaris Independen Perseroan; untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini; Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2029 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi:</u> Direktur Utama : Teky Mailoa; Wakil Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Handoko Wibowo;		





	<u>Dewan Komisaris:</u> Komisaris Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Wakil Komisaris Utama : Monik William; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan Komisaris Independen : Irhoan Tanudiredja. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	Tidak ada / nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.085.199 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		

Jakarta, 19 Juni 2026
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD Perseroan:

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.



PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”), hereby submits the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders convened on Wednesday, June 17th, 2026, at Green Office Park 9, Auditorium, Floor B, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 (hereinafter referred to as the “Meeting”), as follows:

Attended by	The Board of Commissioners: Franciscus Xaverius R.D as Vice President Commissioner Teddy Pawitra as Independent Commissioner Susiyati Bambang Hirawan as Independent Commissioner The Directors: Teky Mailoa as President Director Lie Jani Harjanto as Vice President Director Hongky Jeffry Nantung as Director Handoko Wibowo as Director
Attendance Quorum by the Shareholders	1,839,101,199 shares (99.41%) of total shares 1.850.000.000
Agenda 1	1. To approve the annual report of the Company for the Fiscal Year 2025; 2. To approve the financial statements of the Company for the fiscal year 2025 audited by the Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Report of Independent Auditor 00140/2.1090/AU.1/03/1905-2/1/III/2026 dated March 5th, 2026, with the Unqualified opinion; 3. To ratify the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2025; and 4. To grant a full release and discharge of responsibility (“acquit et de charge”) to: i. The members of the Directors for the performance of their duties and responsibilities in accordance with the objectives of the Company, as well as their duties and responsibilities to represent the Company both within and outside legal proceedings; and ii. The members of the Board of Commissioners for the execution of their duties and responsibilities for overseeing management policies and its operations, as well as advising the Directors of the Company, supporting them and providings approval to the Director of the Company, which is executed during the fiscal year 2025, to the extent that the implementation of these duties and responsibilities is reflected in the Annual Report, Annual Financial Statements and supervisory duty report by the Board of the Commissioners for the fiscal year 2025.

The number of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,101,199 votes (100%)	Nil	Nil
Resolution	Resolved by consensus -		
Agenda 2	1. To determine the proceeds of the Net Profit for the fiscal year 2025, which amounted to IDR422,053,623,230.- (four hundred twenty-two billion fifty-three million six hundred twenty-three thousand two hundred and thirty Rupiah), with details as follows: a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will be set aside as a reserve fund in order to comply with the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of Company Act; b. The remaining IDR420,053,623,230 (four hundred twenty billion fifty-three million six hundred twenty-three thousand two hundred and thirty Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes. 2. Determining the usage of retained earnings balance to be distributed as additional dividends for the 2025 (two thousand twenty-five) fiscal year in the amount of IDR 467,946,376,770,- (four hundred sixty-seven billion nine hundred forty-six million three hundred seventy-six thousand seven hundred seventy Rupiah). 3. Payment of dividends from net profit for the 2025 (two thousand twenty-five) fiscal year and additional dividends from the retained earnings totaling IDR888,000,000,000 (eight hundred eighty-eight billion Rupiah) will be distributed to shareholders. 4. Granting power and authority to the Company's Directors to implement procedures for distributing cash dividends and announcing them in accordance with applicable laws and regulations.		
Number of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,101,199 votes (100%)	Nil	Nil
Resolution	Resolved by consensus		
Agenda 3	1. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the fiscal year 2026, taking into account the recommendations of Nomination and Remuneration Committee; 2. a. to determine the total salary or honorarium and other		

	allowances for the Board of Commissioners for the fiscal year 2026 is at least equal to that received in the fiscal year 2025; and b. to authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the salary or honorarium and other allowances of each member of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2026.		
Number of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1.839.101.199 votes (100%)	Nil	Nil
Resolution	Resolved by consensus		
Agenda 4	To give authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31 st , 2026 with the following criteria: a. Public Accountant that is listed at Financial Service Authority (OJK); b. Has experience in auditing publicly listed companies.		
Number of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,101,199 suara (100%)	Nil	Nil
Resolution	Resolved by consensus		
Agenda 5	The Board of Commissioners reported that based on the Board of Commissioners Resolution of the Company dated September 8 th , 2025, the Audit Committee of the Company has been appointed with term of office commencing upon the closing of Annual General Meeting of Shareholders financial year 2024 until the closing of General Meeting of Shareholders financial year ended December 31 st , 2029 with the following compositions: Chairman : Teddy Pawitra Member : Rudiantara Member : Rizal E. Halim		

**SCHEDULE AND PROCEDURE
ON THE CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PT DUTA PERTIWI Tbk
Fiscal Year of 2025**

1. Schedule of the Cash Dividend Distribution

Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on June 29th, 2026, until 16.00 WIB (Recording Date) with the following provisions:

- June 25th, 2026 : Cum Cash Dividend in Regular and Negotiation Market;
- June 26th, 2026 : Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market;
- June 29th, 2026 : Cum Cash Dividend in Cash Market;
- June 30th, 2026 : Ex Cash Dividend in Cash Market;
- July 16th, 2026 : Cash Dividend Payment.

2. Procedures for Cash Dividend Distribution:

- a. Cash dividend will be distributed to the Shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company as of June 29th, 2026 until 16:00 Western Indonesian time (Recording Date) and/or Shareholders of the Company in the Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 29th, 2026 and the amount of dividends to be received per share will be informed after the Recording Date
- b. For shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed into the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 16th, 2026. Proof of cash dividend payments will be distributed by KSEI to shareholders through the Securities Companies or Custodian Banks where the shareholders opened their accounts.
- c. For shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI and/or shareholders in the Script form (Collective Share Certificate), are required to submit their NPWP to the Company's Share Registrar PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Floor 7, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Central Jakarta 10250, no later than June 29th, 2026 at 16:00 WIB.
- d. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividends will be exempt from income tax if received by domestic institutional taxpayer shareholders ("Domestic Institutional Taxpayers") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the said Domestic Institutional Taxpayers. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("Domestic Individual Taxpayers") will be exempt from income tax as long as the dividends are invested in the territory of the area of Republic of Indonesia in the form of predetermined investments and within a certain period as stipulated in Article 4 (3) letter f number 1. a) Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times, most recently by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayers who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and the PPh must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of

Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

- e. For shareholders other than those mentioned in letter (d) above, the cash dividend will be subject to tax in accordance with applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholder concerned and will be deducted from the amount of cash dividends for the 2025 fiscal year to which the shareholder is entitled.
- f. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Company's Share Registrar PT Sinartama Gunita, located at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Central Jakarta 10250, no later than June 29th, 2026 at 16:00 WIB. If by the specified time, KSEI or Share Registrar still has not received the NPWP, then the cash dividends paid to the Indonesian Legal Entity will be subject to Income Tax of 30%.
- g. Shareholders who are Foreign Taxpayers who will use the rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) are required to fulfill the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36/2008 and submit a Certificate of Domicile (SKD) and Form DGT that have been legalized by the Tax Service Office of Listed Companies to KSEI or Share Registrar within the time period following KSEI provisions, without the SKD in question, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, June 19th, 2026
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors

Referring to Article 15 paragraph 7 of the Article of Associations: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.

PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA
THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company") hereby submits the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company convened on Wednesday, June 17th, 2026, at Green Office Park 9, Auditorium, Floor B, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:

Attended by	The Board of Commissioners: Franciscus Xaverius R.D as Vice President Commissioner Teddy Pawitra as Independent Commissioner Susiyati Bambang Hirawan as Independent Commissioner The Directors: Teky Mailoa as President Director Lie Jani Harjanto as Vice President Director Hongky Jeffry Nantung as Director Handoko Wibowo as Director												
Attendance Quorum by the Shareholders	1,839,085,199 shares (99.41%) of the total shares 1,850,000,000.												
Agenda 1	A. Approving the amendment to Article 3 of the Company's articles of association regarding the Company's aims and objectives and business activities in connection with the separation of the classification of main and supporting business fields and adjustments to conform to the 2025 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI), so that Article 3 of the Company's Articles of Association shall henceforth read as follows:												
	Aims, Objectives and Business Activities Article 3 1. The purpose and objectives of the Company are to conduct business in the following areas:												
	<table> <tr> <td>1629</td><td>OTHER WOOD PRODUCTS INDUSTRY, CORK, STRAW, RATTAN, BAMBOO AND THE SIMILAR PRODUCTS;</td></tr> <tr> <td>3600</td><td>WATER COLLECTION, EXTRACTION, PROCESSING AND SUPPLY;</td></tr> <tr> <td>4101</td><td>CONVENTIONAL BUILDING CONSTRUCTION;</td></tr> <tr> <td>4210</td><td>ROAD AND RAILWAY CONSTRUCTION;</td></tr> <tr> <td>4220</td><td>UTILITY PROJECT CONSTRUCTION;</td></tr> <tr> <td>4299</td><td>OTHER CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION (NOT CLASSIFIED)</td></tr> </table>	1629	OTHER WOOD PRODUCTS INDUSTRY, CORK, STRAW, RATTAN, BAMBOO AND THE SIMILAR PRODUCTS;	3600	WATER COLLECTION, EXTRACTION, PROCESSING AND SUPPLY;	4101	CONVENTIONAL BUILDING CONSTRUCTION;	4210	ROAD AND RAILWAY CONSTRUCTION;	4220	UTILITY PROJECT CONSTRUCTION;	4299	OTHER CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION (NOT CLASSIFIED)
1629	OTHER WOOD PRODUCTS INDUSTRY, CORK, STRAW, RATTAN, BAMBOO AND THE SIMILAR PRODUCTS;												
3600	WATER COLLECTION, EXTRACTION, PROCESSING AND SUPPLY;												
4101	CONVENTIONAL BUILDING CONSTRUCTION;												
4210	ROAD AND RAILWAY CONSTRUCTION;												
4220	UTILITY PROJECT CONSTRUCTION;												
4299	OTHER CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION (NOT CLASSIFIED)												



	ELSEWHERE); 4312 LAND PREPARATION; 4321 ELECTRICAL SYSTEM INSTALLATION; 4322 PLUMBING, HEATING, AND AIR CONDITIONING INSTALLATION; 4329 OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION; 4330 BUILDING CONSTRUCTION COMPLETION; 4610 WHOLESALE TRADE ON A FEE OR CONTRACT BASIS; 5221 SERVICE ACTIVITIES RELATED TO LAND TRANSPORTATION; 5610 RESTAURANT AND FOOD SERVICE ACTIVITIES; 6811 RESIDENTIAL REAL ESTATE (BUILDINGS AND LAND) ACTIVITIES, OWNED OR RENTED; 6812 NON-RESIDENTIAL REAL ESTATE (BUILDINGS AND LAND) ACTIVITIES, OWNED OR RENTED; 6829 FEE-BASED REAL ESTATE OR OTHER CONTRACT-BASED REAL ESTATE ACTIVITIES; 7020 MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTING ACTIVITIES; 8130 LANDSCAPING SERVICES; 9311 SPORTS FACILITY MANAGEMENT; 9321 THEME PARKS AND AMUSEMENT PARKS
	2. To achieve the above aims and objectives, the Company may carry out the following business activities: a. Main business activities: 68111 RESIDENTIAL BUILDING AND LAND DEVELOPMENT ACTIVITIES; 68112 RESIDENTIAL BUILDING AND LAND RENTAL ACTIVITIES, OWNED OR LEASED; 68125 SHOPPING CENTER MANAGEMENT; 68126 WAREHOUSE RENTAL AND SELF- STORAGE FACILITIES; 68127 OFFICE BUILDING MANAGEMENT; 68129 OTHER NON-RESIDENTIAL REAL ESTATE ACTIVITIES (BUILDINGS AND LAND), OWNED OR LEASED; 68292 RESIDENTIAL REAL ESTATE MANAGEMENT ON A FEE OR CONTRACT BASIS 68299 REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR OTHER CONTRACT BASIS (NOT





	CLASSIFIED ELSEWHERE);
	b. Supporting business activities:
16291	WOVEN GOODS INDUSTRY FROM RATTAN AND BAMBOO;
16292	WOVEN GOODS INDUSTRY FROM PLANTS OTHER THAN RATTAN AND BAMBOO;
16293	WOOD CARVING INDUSTRY, NON-FURNITURE;
36001	DRINKING WATER PROCESSING AND SUPPLY;
36003	WATER SUPPLY SUPPORT ACTIVITIES;
41011	CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS;
41012	CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDINGS;
41014	CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF SHOPPING BUILDINGS;
41017	CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF LODGING BUILDINGS;
41018	CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF ENTERTAINMENT AND SPORT BUILDINGS;
41019	CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF OTHER BUILDINGS;
42101	SURFACE ROAD CONSTRUCTION;
42102	CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION OF BRIDGES, OVERPASSES, FLYOVERS, AND UNDERPASSES;
42201	IRRIGATION AND DRAINAGE NETWORK CONSTRUCTION;
42202	CIVIL STRUCTURE CONSTRUCTION FOR CLEAN WATER TREATMENT;
42203	CIVIL STRUCTURE CONSTRUCTION FOR WASTE TREATMENT SYSTEMS;
42204	CIVIL STRUCTURE CONSTRUCTION FOR ELECTRICALS;
42205	TELECOMMUNICATION CIVIL STRUCTURE CONSTRUCTION FOR TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE;
42206	TELECOMMUNICATION CENTRAL CONSTRUCTION;
42207	GROUNDWATER DRILLING/EXCAVATION CONSTRUCTION;
42209	OTHER UTILITY PROJECT CONSTRUCTION;
42999	OTHER CIVIL STRUCTURE CONSTRUCTION (NOT CLASSIFIED ELSEWHERE);
43120	LAND PREPARATION;



	43211	ELECTRICAL NETWORK INSTALLATION;	
	43212	TELECOMMUNICATION NETWORK INSTALLATION;	
	43221	PLUMBING INSTALLATION;	
	43223	GAS DISTRIBUTION NETWORK INSTALLATION;	
	43299	OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION (NOT CLASSIFIED ELSEWHERE);	
	43301	GLASS, DOORS, FRAMES, WINDOWS, AND THE LIKE INSTALLATION;	
	43302	FLOORING, WALLS, AND CEILING WORK;	
	43303	PAINTING;	
	43309	OTHER BUILDING CONSTRUCTION COMPLETION;	
	46100	WHOLESALE TRADE ON A FEE OR CONTRACT BASIS;	
	52215	OFF-STREET PARKING ACTIVITIES;	
	56101	FOOD PROVISION ACTIVITIES IN PERMANENT BUILDINGS;	
	68122	INDUSTRIAL AREA MANAGEMENT;	
	70209	MANAGEMENT AND OTHER BUSINESS CONSULTING ACTIVITIES;	
	81300	LANDSCAPING SERVICES;	
	93113	ARENA FACILITIES;	
	93114	FIELD FACILITIES;	
	93119	MANAGEMENT OF OTHER SPORT FACILITIES;	
	93210	THEME PARK AND AMUSEMENT PARK FACILITIES.	
	B. Granting authority to the Company's Directors to state the resolutions of this Meeting in a Notarial Deed and to undertake all necessary actions made before a Notary; accessing the Legal Entity Administration System; submitting and conveying changes to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia to obtain a letter of approval for changes to the Company's Articles of Association (SP-PAD) as referred to in Article 23 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law.		
Number of queries from the shareholders	None		
Voting result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,085,199 votes (100%)	Nil	Nil
Resolution	Resolved by consensus		



Agenda 2

1. a. accept the resignation of Mr. Muktar Widjaja from his position as President Commissioner of the Company;
 - b. honorably discharge Mr. Franciscus Xaverius Ridwan Darmali from his position as Vice President Commissioner of the Company;
- by providing a release and discharge of responsibility ("acquit et de charge") for the supervisory actions they have carried out during their tenure, as long as these actions are in accordance with or do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.;

c. approve the appointment of:

- Mr. Franciscus Xaverius Ridwan Darmali as the Company's President Commissioner;
- Ms. Monik William as the Company's Vice President Commissioner;
- Mr. Irhoan Tanudiredja as the Company's Independent Commissioner;

for the remainder of the term of office of the members of the Company's Board of Commissioners who are currently serving;

Accordingly, the composition of the members of the Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year ending on December 31st, 2029 which will be held no later than June 2030, without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him/her (them) at any time before his/her (their) term of office ends, so that the composition of the members of the Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

The Directors:

President Director	: Teky Mailoa;
Vice President Director	: Lie Jani Harjanto;
Director	: Hongky Jeffry Nantung;
Director	: Handoko Wibowo;

The Board of Commissioners:

President Commissioner	: Franciscus Xaverius Ridwan Darmali;
Vice President Commissioner	: Monik William;
Independent Commissioner	: Teddy Pawitra;
Independent Commissioner	: Susiyati Bambang Hirawan
Independent Commissioner	: Irhoan Tanudiredja.

2. Granting power of attorney to the Company's Directors to state the resolutions of the Meeting in a Deed of Meeting Resolutions





	made before a Notary and submitting notification of changes to the Company's data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of notification of changes to the Company's data from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.		
Number of queries from the shareholders	None		
Voting result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,085,199 votes (100%)	Nil	Nil
Resolution	Resolved by consensus		

Jakarta, June 19th, 2026
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors

Referring to Article 15 paragraph 7 of the Article of Associations: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.

